

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA

SIALANG PANJANG KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



OLEH :

KASMAWATI

165310828

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA

SIALANG PANJANG KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata -1
(S1) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*

OLEH :

KASMAWATI

165310828

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di desa sialang panjang kecamatan tembilahan hulu kabupaten indragiri hilir, tujuan dari penelitian ini dapat mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada pemerintahan desa sialang panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pengurus desa sialang panjang terkait dasar pencatatan dan pengakuan yang digunakan pada desa. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Pembantu Pajak, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi analisis data, dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada pemerintahan desa Sialang Panjang belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

ABSTRACT

This research was conducted in sialangPanjang village, TembilahanSubdistrict, Indragiri hilirDistrict, the purpose of this study was to determine the suitability of accounting application in SialangPanjang village government with generally accepted accounting principles.

Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the results of interviews with long sialang village administrators related to the basis of recording and recognition used in the village. Meanwhile, secondary data is data obtained indirectly, namely data obtained by collecting General Cash Books, Village Bank Books, Activities Assisting Cash Books, Tax Assistant Cash Books, Village Income and Expenditure Budget Implementation Reports, and Village Property Reports. Data collection techniques through interviews and data analysis documentation, and this research uses descriptive methods.

Based on the results of the data analysis that has been done, it can be concluded that the application of accounting in the village government of SialangPanjang is not in accordance with the General Acceptable Accounting Principles.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA SIALANG PANJANG KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”. Shalawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memabwa kita dari alam jahiliyah hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan saat ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalah dan jauh dari kata sempurna karna menyadari segala keterbatasan yang ada. Maka dari iti penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan serta do'a dari orang yang sangat luar biasa. Oleh karna itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang Tua saya yaitu Bapak H. Nawawi dan ibu Hj. Siti sulaiha yang telah memberikan dukungan

2. Keempat adik saya yaitu Maryam. Jumiati, Nia Ramadani, Hasna Wati, dan nenek saya yaitu Hj. Nasirah yang telah memberikan dukungan serta motivasinya agar saya segera wisuda.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, Sh., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
4. Bapak hariswanto, SE.M.Si.Ak.CA.CPA Selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, AK, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Ibu Hj.Siska,S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Ekonomi Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dian Saputra, SE, M. Acc.,Ak. CA., ACPA selaku Wakil Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Islam Riau.
8. Bapak Kepala Desa H.M. YUSUF KURNAIN dan semua perangkat desa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada desa SIALANG PANJANG serta telah mengizinkan penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
9. Teman teman, Fasay Inum, Putri Nabila, Yunita Pradika.V,Nopri Oriza Sativa, Siti Najiha, Ratih Murniati, Mutia Putri Anisa, Reza Gustiana dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah mendukung dan memberi motivasi saya dalam penulisan tugas ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikan dan dukungan yang telah kalian berikan, serta semoga Allah selalu melindungi dan mempermudah segala urusan kita. Aamiin

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua orang yang membacanya dan penulis mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran yang telah diberikan.

Pekanbaru ,11 Oktober 2020

Penulis

KASMAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN NOTULENSI PERBAIKAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1. Telaah Pustaka	9
2.1.1. Definisi Akuntansi	9
2.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi	9
2.1.3. Konsep Dasar Akuntansi.....	10
2.1.4. Prinsip Akuntansi.....	11
2.1.5. Aspek-Aspek Akuntansi.....	11
2.1.6. Definisi Desa.....	12
2.1.7. Struktur Organisasi Desa.....	13
2.1.8. Sistem Pencatatan.....	14
2.1.9. Dasar-Dasar Pengakuan Keuangan Desa.....	15
2.1.10. Laporan Keuangan Desa	16
2.1.11. Tahapan Laporan Keuangan	17
2.1.12. Penyusunan Laporan keuangan.....	18
2.2. HIPOTESIS.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	19
3.2 Jenis dan Sumber Data	19

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	19
----------------------------------	----

3.4 Teknik Analisis Data.....	19
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Sialang Panjang.....	20
--	----

4.2. Visi dan Misi Desa Sialang Panjang.....	21
--	----

4.2.1. Visi.....	21
------------------	----

4.2.2. Misi.....	22
------------------	----

4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	25
---	----

4.3.1. Dasar Pencatatan Pengakuan Pendapatan Dan Beban.....	25
---	----

4.3.2. Siklus Akuntansi Pada Desa Sialang Panjang.....	25
--	----

4.3.3. Penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).....	39
--	----

4.3.4. Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa.....	41
---	----

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	42
----------------------	----

5.2. Saran.....	42
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia setelah memasuki masa reformasi berkembang dengan sangat pesat. Prinsip demokrasi mulai diterapkan kembali. Sistem pemerintahan sebelumnya perlahan mulai ditinggalkan, terlihat pada berlakunya otonomi daerah. Pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Khususnya pada pemerintah desa saat ini dapat mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun sumber-sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Pendapatan Asli Desa terdiri atas Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong. Selanjutnya, Pendapatan Transfer meliputi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Pendapatan Lain-lain terdiri atas Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan

pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas tersebut maka dapat membantu pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia yang ada didalamnya.

Pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa yang cukup besar setiap tahunnya untuk diberikan kepada desa. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi sebesar Rp.628 juta untuk tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 dana desa meningkat menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi sebesar Rp. 800 juta, selanjutnya pada tahun 2018 dana desa tidak mengalami peningkatan atau tetap yaitu Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi dana sebesar Rp. 800 juta masih sama seperti pada tahun 2017.

Melihat dana desa yang diterima cukup besar tentu akan membawa dampak positif bagi kemajuan desa dan akan memberikan kesempatan bagi desa untuk membuat perubahan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengangkat desa sebagai subjek pembangunan, yang dulunya hanya sebatas objek pembangunan sekarang menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan. Besarnya dana desa yang diterima diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sehingga akan meminimalisir persoalan kemiskinan, kesenjangan masyarakat dan masalah sosial lainnya. Hal tersebut tentu menjadi peran dan tanggungjawab yang besar bagi desa. Maka, didalam tata pemerintahannya, pemerintah desa harus melaksanakan prinsip akuntabilitas yang artinya seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa dalam “IAI-KASP Tahun 2015 diantaranya:(1) Perencanaan , adalah suatu rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang dibuat, kemudian disampaikan oleh kepala desa, kemudian dibahas dengan badan permusyawaratan desa untuk dapat disepakati bersama paling lambat pada bulan oktober tahun berjalan. (2) Pelaksanaan, dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. (3) Penatausahaan, bendahara desa wajib melakukan suatu pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan dalam penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan; Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank. (4) Pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota yang meliputi: pada laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. (5) Pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi : laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang terkait. (6) Pembinaan dan pengawasan, pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian serta penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah dari kabupaten/kota kepala desa”.

Desa sialang panjang telah membuat Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa dan Buku Pembantu Kegiatan. Meskipun telah menggunakan sistem siskuides atau sudah menggunakan *computeriazing*. Namun, ternyata dalam pengakuannya masih sering terdapat kesalahan dalam laporan keuangan desa. Hal ini disebabkan karna kemampuan sumber daya manusia yang masih sangat terbatas.

Pada tahun 2017 desa sialang panjang menerima dana desa dari pusat sebesar Rp. 807.661.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 769.847.000. Dilihat dari tahun 2017 ke tahun 2018 dana desa yang diterima mengalami penurunan sebesar Rp. 37.814.000. Dana desa yang diterima pada tahun 2017 tersebut digunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat dan pada tahun 2018 digunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diterima oleh desa sialang panjang dari pusat akan masuk ke rekening desa dan akan digunakan untuk keperluan desa. Jika ada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai, desa sialang panjang mencatatnya pada Buku Kas Umum Tunai disertai dengan bukti transaksi berupa kwitansi dan nota. Selanjutnya desa desa menyajikan Buku Bank Desa untuk dapat merekap uang masuk dan penarikan keuangan, sedangkan Buku Pembantu Pajak digunakan untuk rekapitulasi keuangan pajak. Selain itu, desa memiliki Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Rincian Pendapatan untuk membuat pencatatan agar lebih terlihat jelas dan rinci.

Setelah pencatatan dilakukan dengan jelas, desa sialang panjang membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa untuk mencatat pendapatan, belanja dan pembiayaan sehingga akan diketahui pada akhir periode sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran tahun tertentu. Selanjutnya desa sialang panjang membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang menyajikan aset yang meliputi aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban serta ekuitas pemerintah desa per 31 Desember tahun 2017 dan 2018. Pada laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 pada bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp. 0, karna bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan aset tetap yang ada seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan jaringan dan instalasi.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 terdapat Aset Tetap senilai Rp. 965.578.100. Yaitu berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 86.952.000, gedung dan bangunan sebesar Rp. 28. 687.000, jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp. 849.339.100, aset tetap lainnya sebesar Rp. 600.000. ditahun 2018 belanja modal dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDesa senilai Rp. 839. 327.500 yaitu berupa belanja modal pengadaan alat-alat angkutan sebesar RP. 1.500.000 berupa belanja modal pengadaan mesin pertanian sebesar Rp. 1.945.000, belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya sebesar Rp. 35.615.000, belanja modal pengadaan kipas angin sebesar Rp. 1.000.000, belanja modal pengadaan mesin tik sebesar Rp. 4.000.000, belanja modal pengadaan komputer / PC, note book sebesar Rp. 20.000.000, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan sebesar Rp. 31.600.000, belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp. 575.065.000, belanja modal pengadaan konstruksi jembatan sebesar

Rp. 70.157.500, belanja modal pengadaan konstruksi jerambah sebesar Rp. 157.445.000, belanja modal pengadaan sarana dan prasarana PAUI sebesar Rp. 4.215.000, belanja modal pengadaan dandang/wajan/kuali dan S sebesar Rp. 795.000, belanja modal pengadaan buku dan kepustakaan sebesar Rp. 50.000. disaldo Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 saldo aset tetap adalah senilai Rp. 903.387.500 yang terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp. 100.670.000, jalan jaringan dan instalasi sebesar Rp. 802.667.500 dan aset lainnya sebesar Rp. 50.000, pemerintahan desa sialang panjang tidak melakukan penambahan aset pada laporan kekayaan milik desa untuk tahun 2018.

Selanjutnya yaitu pada Laporan Kekayaan Milik Desa pada tahun 2017 dan 2018 pada akun persediaan yang ada, didalam laporan tersebut desa sialang panjang tidak membuat jurnal penyesuaian perlengkapan untuk perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK), dimana saldo dari persediaan perlengkapan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa bernilai Rp. 0.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah kesesuaian penerapan Akuntansi Keuangan Desa Yang Diterapkan Di Kantor Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian akuntansi keuangan desa yang diterapkan pada desa sialang panjang kecamatan tembilahan hulu dengan prinsip akuntansi berterima umum.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi pada pemerintahan ddesa.

b) Bagi kantor desa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih baik kedepannya.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Bagi pihak lain, penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama dimasa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang telah diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penulisan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menguraikan dan menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran bagi kantor desa maupun bagi penulis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Definisi Akuntansi

Akuntansi yaitu suatu aktivitas dalam menulis suatu data laporan keuangan sehingga dapat dijadikan sebuah kabar yang bermanfaat untuk pemakainya (IAI-KASP 2015). Sujarweni (2015:1) Akutansi : aktivitas jasa yang berawal dari pencatatan sebuah transaksi, mengkalaisfikasikan kemudian melakukan pelaporan setiap kejadian tersebutagar menerbitkan kabar keuangan yang dibutuhkan sama phak-pihak yang membutuhkan.

Menuruut warren carlk, dkk (2014-3) dapat diartikan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan yang bisa dipergunakan sama pengguna informasi dari orang-orang yang berkepentingan.

Sasongko catur (2016:2-4) akuntansi adalah suatu system yang menyediakan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh entitas perusahaan dapat mengukur kegiatan perusahaan.

2.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi

Deddi nordiawan (2012: 3-4) didasarkan dengan tujuan pemakainya akuntansi diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Akuntansi komersial

Akuntansi komersial masuk ke bagian akutansi wilayah privat, yang berarti bahwasannya akuntansi komersial yaitu lembaga profit. Dengan

demikian, setiap informasi keuangan di loprkan kepada manajemen, investor dan kreditor akuntansi.

2. Akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintah termasuk kedalam organisasi sektor publik, karna merupakan organisasi non profit/nirlaba. Dalam akuntansi pemerintahan informasi keuangan digunakan oleh oknum-oknum eksekutif, ligislatif, yudikatif dan masyarakat.

3. Akuntansi sosial

Yaitu bidanng akuntansi yang digunakan oleh lembaga makro dan memberikan pelayanan perekonomian nasional.

2.1.3. Konsep Dasar Akuntansi

Abdul halim dan muhammad imam kusufi (2014-37) Adapun Konsep Dasar Akuntansi yaitu atas:

1. Konsep kepemilikan akuntansi

Yaitu seluruh aktivitas atau kejadian yang ditulis merupakan aktivitas yang terjadi oleh lembaga tersebut.

2. Konsep Kelangsungan usaha

Yaitu perusahaan atau organisasi yang membuat laporan keuangan agar dapat memilik kesanggupan untuk meneruskan kegiatannya untuk masa mendatang.

3. Konsep periodisasi

Setisap kejadian atau aktivitas ekonomi bisa dipisahkan jadi waktu akuntansi. Waktu akuntansi 1 tahun dimulai dari bulan satu sampai

dengan bulan dua belas . peLaporan keuangan yang diterbitkan berupa penerimaan dan pengeluaran dalam 1 waktu akuntansi.

4. Konsep unit moneter

Menyebutkan bahwasannya akuntansi memakai satuan moneter sebagai alat ukur. Seperti unit moneter didalam akuntansi yaitu Rupiah.

2.1.4. Prinsip Akutansi

Menurut IAI-KASP (2015-7) Adapun prinsip prinsip akuntansi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Harga Perolehan
- b. Prinsip Realisasi Pendapatan
- c. Prinsip Objektif.
- d. Prinsip pengungkapan penuh
- e. Prinsip konsistensi

2.1.5. Aspek-Aspek Akuntansi

Menurut IAI KASP (2015) aspek-aspek akuntansi teerdiri atas:

1. Aspek fungsi

Yaitu menyajikan kabar ke entitas tertentu agar dapat melakukan tindakan yang efektiif dan efisien. Dengan fungsi tindakan untuk melakukan prencanaan, pengawasan, dan dapat menghasilkan sebuah keputusan untuk suatu entitas dan bisa dipergunakan baik untuk dalam dan luar.

2. aspek kegiatan

Yaitu langkah menelisik data, menjadikan bagian data yang relevan, lalu dianalisis dan dijadikan sebuah kabar yang bisa dipergunakan dalam mengambil sebuah keputusan.

2.1.6. Defini Desa

Secara universal desa merupakan sebuah aglomerasi suatu pemukiman diarea pedesaan. Diindonesia, istilah desa merupakan bagian suatu wilayah adminisratif diindonesia dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.

Pengertian desa dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 poin 1:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak Tradisioal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik indonesia.

Pengertian Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah :

Desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.7. Struktur Organisasi Desa

Menurut david wijaya (2018:49-52) pengelolaan teknis dilaksanakan keuangan desa terdiri dari :

1. Kepala desa

Kepala desa mempunyai waktu menjabat selama enam tahun dan dapat mencalonkan diri dan menjabat 3 kali runtut maupun tidak, kepala desa merupakan seorang pemimpin pemerintahan desa yang mempunyai kuasa untuk mengelola desa menentukan aturan-aturan dalam APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Bertugas membantu kepala desa dalam penyusunan serta pengelolaan APBDesa.

3. Kepala seksi/ kepala urusan

Mengemban tugas untuk melaksanakan aktivitas menurut dengan bagian yang diambil, misalnya bagian keuangan, pemerintahan dan development.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa bertugas dalam hal keuangan desa yang mencakup pemasukan pendapatan maupun pembuangan dalam melaksanakan APBDesa. Penatausahaan dilaksanakan dengan memakai berbagai buku diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank desa. penatausah/aan yang dilakukan adalah:

- 1) Penerimaan, menyimpan dan penyetoran
- 2) Pemungutan dan menyetorkan PPH dan pajak lainnya

- 3) Menulis setiap pemasukan maupun pengeluaran dan melaksanakan tutup buku tiap akhir bulan dengan seksama
- 4) Mempertanggungjawabkan uang dengan melalui laporan pertanggungjawaban

2.1.8. Sistem Pencatatan

Menurut Halim dan Kusufi 2012 ada tiga jenis sistem pencatatan akuntansi yaitu sebagai berikut:

1) *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut juga dengan sistem *tata buku tunggal* atau *tata buku saja*. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2) *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* disebut juga dengan sistem *tata buku berpasangan*. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Debit berada disebelah kiri sedangkan kredit di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus dapat menjaga keseimbangan dari persamaan dasar akuntansi.

3) *Triple entry*

Triple entry yaitu sistem pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* kemudian ditambah dengan mencatat pada buku anggaran. Sistem pencatatan *double entry* di jalankan oleh pemerintah,

pejabat perusahaan keuangan (PPK), satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) bahkan bagian keuangan atau satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) akan mencatat transaksi pada buku anggaran, agar pencatatan yang dilakukan akan berdampak pada sisi anggaran.

2.1.9. Dasar Pengakuan Keuangan Desa

Dasar pengakuan merupakan penentuan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan sebagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Menurut Halim dan Kusufi (2021) adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (*cash basis*)

Basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

b. Basis Kas (*accrud basis*)

Basis akrual yaitu transaksi atau dicatat pada terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual akan digunakan dalam pengukuran aset, kewajiban dan akuitas dana.

c. Basis Kas Modifikasian (*modified cash basis*)

Basis kas modifikasian yaitu mencatat suatu transaksi selama tahun anggaran serta melakukan penyesuaian diakhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d. Basis Akrual Modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis akrual modifikasian yaitu proses mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas pada transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

2.1.10. Laporan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Laporan Keuangan Desa yang harus dilaporkan terdiri atas:

1. Anggaran

Anggaran merupakan besarnya pengeluaran yang akan terjadi dalam satu tahun. Dalam pemerintahan desa anggaran juga disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

2. Buku Kas Umum

Seluruh aktivitas atau kejadian yang terjadi nantinya dicatat dalam buku kas umum baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Didalam buku kas umum berisi kolom tanggal, nomor rekening, uraian, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, jumlah pengeluaran kumulatif dan saldo.

3. Buku Pajak

Melakukan pencatatan atas segala transaksi mengenai dengan pajak baik itu pemungutan maupun dalam penyetoran pajak.

4. Buku bank

Bertujuan untuk Mencatat seluruh transaksi yang mempengaruhi saldo bank.

5. Laporan Realisasi Anggaran

Yang berisikan kolom anggaran realisasi dan lebih/kurang.

2.11. Tahapan Laporan Keuangan

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa (Sujarweni-2015) adalah:

1. Membuat perencanaan yang berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang telah dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran di sahkan maka langkah selanjutnya adalah anggaran perlu dilaksanakan.
3. Pada pelaksanaan anggaran akan timbul transaksi. Maka dari itu transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan secara lengkap berupa pembuatan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Inventaris dengan disertai dengan pengumpulan Bukti-bukti transaksi.
4. Untuk dapat memperoleh suatu informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini berguna untuk dapat mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain dapat menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran maka dibuatlah Laporan Realisasi Anggaran Desa.

2.1.12. Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Langkah akhir dari proses akuntansi yaitu penyusunan laporan keuangan. Data yang ada dalam laporan keuangan berasal dari neraca lajur, (Wijaya David:125-131), laporan keuangan yang dihasilkan berupa laporan pertanggungjawaban APBDesa dan kekayaan milik desa.

2.2. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan dan telaah pustaka maka dapat diambil hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Akuntansi Keuangan Desa pada Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang didapat secara tatap muka dari pegawai yaitu dengan melakukan dialog langsung.
- b. Data sekunder yaitu data yang diterima dari kantor desa sialang panjang dalam bentuk laporan keuangan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke bendahara dengan secara langsung.
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengambilan dokumen yang sudah ada dan tidak dirubah oleh penulis.

3.4. Teknik Analisis Data

Dengan memakai teknik deskriptif adalah dikumpulkannya dan mengelompokkan data lalu ditelaah dengan telaah pustaka yang relevan yang nantinya digunakan dalam mengambil keputusan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Sialang Panjang

Desa sialang panjang terletak dipinggiran sungai batang tuaka, dimana desa sialang panjang termasuk dalam salah satu di kecamatan tembilahan hulu. Sebelum masuk di kecamatan tembilahan hulu, desa sialang panjang awalnya termasuk pada wilayah kecamatan tembilahan.

Nama desa sialang panjang dari bahasa melayu, sialang adalah sebatang pohon yang dihinggapi oleh segerombolan lebah yang membuat sarang. Pohon yang dihinggapi oleh lebah tersebut disebut sialang. Kata panjang diambil dari pohon sialang yang tinggi. Dengan demikian masyarakat setempat menamai perkampungannya dengan nama sialang panjang.

Sebelum bernama sialang panjang, dulu dikenal dengan nama kenegerian sialang panjang. Nama kepala pemerintahan diwaktu itu disebut dengan Kepala Negeri. Desa sialang panjang berdiri dimasa pemerintahan Hindia Belanda.

Tabel IV.1**Nama Dan Periode Jabatab Kepala Desa**

NO	Nama	Periode Jabatan
1.	MATAHAR	Kolonial Belanda
2.	MATUNIL	Kolonial Belanda
3.	AKIN	Jepang
4.	GURDANI	Agresi
5.	H. SAMAN	Setelah Agresi
6.	MAIL RENDAH	1953-1955
7.	MAIL TINGGI	1955-1960
8.	SULAIMAN	1960-1971
9.	MOHD. NAFIAH. Z	1971-1989
10.	AMINULLAH UMAR	1989-1998
11.	Drs. EDY SUPRATMAN	1998-1999
12.	H. MATJAM	1999-2014
13.	JASWANDI	2014-2015
14.	H. M. YUSUF KURNAIN	2015-S/d sekarang

Sumber: Nama Dan Periode Jabatan Kepala Desa Sialang Panjang

Adapun pembagian wilayah Desa Sialang Panjang diantaranya adalah:

1. Pembagian wilayah desa diantaranya:

- a. Dusun Benua Langkar : 2 RW, 5 RT
- b. Dusun Pandan Sari : 3 RW, 9 RT
- c. Dusun Resetlement : 3 RW, 10 RT
- d. Dusun Gemilang : 2 RW, 8 RT

2. Batas Wilayah desa diantaranya:

- a. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Pekan Kamis

- b. Sebelah Barat Berbataskan dengan Kelurahan Tempuling
- c. Sebelah Selatan Berbataskan dengan Desa P. Palas-Kel
Tempuling
- d. Sebelah Utara Berbataskan dengan Sungai Batang Tuaka

Desa Sialang Panjang secara administratif termasuk wilayah kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Desa sialang panjang terbentuk pada tahun 1938 dengan kode wilayah 14-03-061-003, dengan no kode 29251, dengan luas wilayah 7.560 Ha, dan jumlah penduduk 2.751 jiwa yang terdiri dari laki-laki dengan jumlah 1.300 jiwa perempuan 1.451 jiwa, dengan jumlah KK 741 KK. Sedangkan kemiringan lahan yang ada di Desa sialang panjang sangat bervariasi.

4.2. Visi dan Misi Desa Sialang Panjang

4.2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa sialng panjang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sialang Panjang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa Sialang Panjang adalah:

“TERWUJUDNYA DESA BERWAWASAN EKONOMI
KERAKYATAN YG BERBASIS PERTANIAN AGRI BISNIS

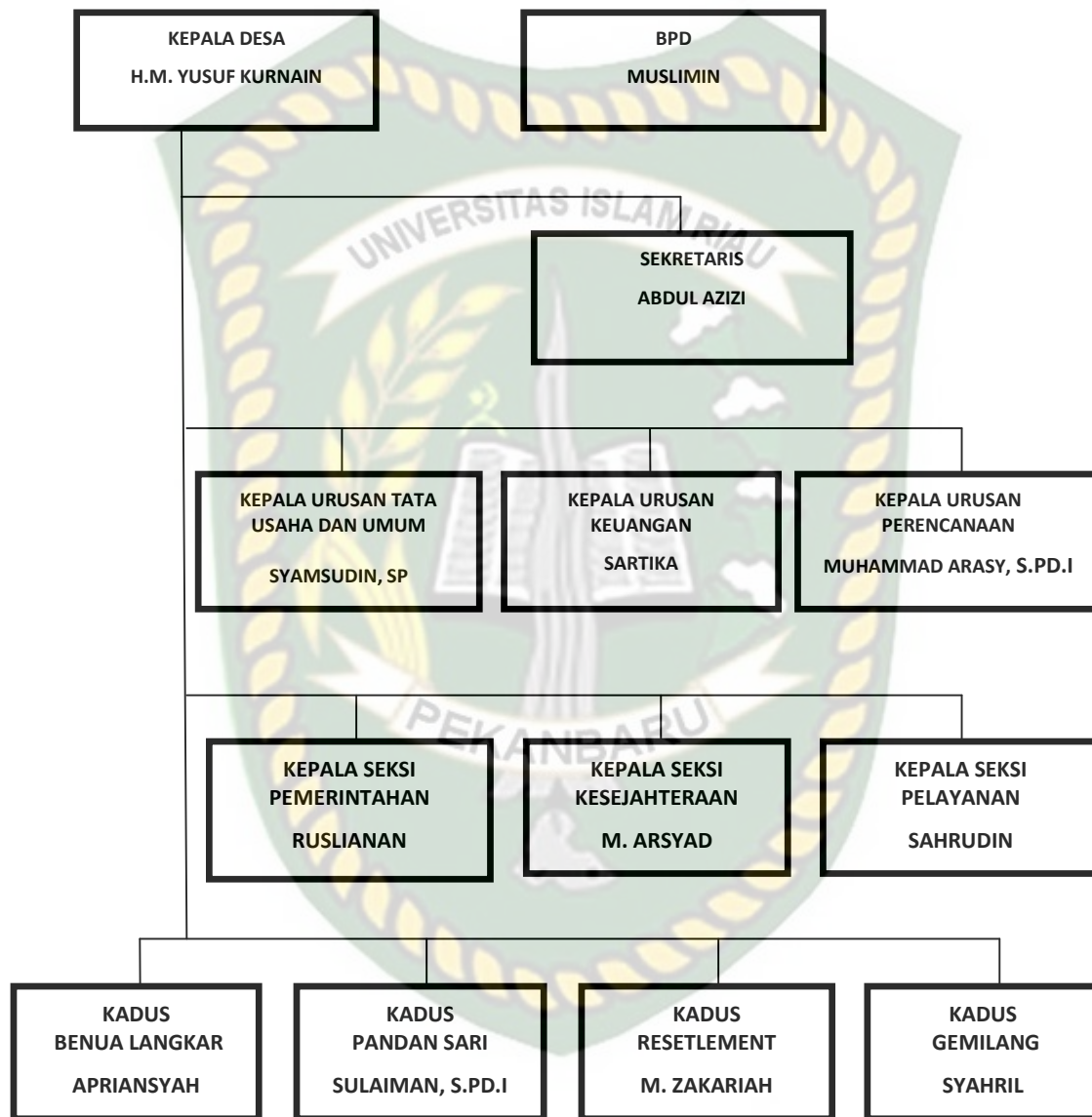
DIDUKUNG OLE SUMBER DAYA MANUSIA YANG MANDIRI,
AGAMIS, SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN”

4.2.2. Misi

Selain penyusun visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasioanalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunanya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa sialang panjang, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sialang Panjang adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.
2. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
5. Pengembangan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA (TIPE 1) SIALANG PANJANG**



Sumber: *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sialang Panjang*

4.3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan dengan landasan teori yang telah dijelaskan pada BAB II dan tinjauan penerapan Akutansi Keuangan pada Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Prinsip Akutansi Berterima Umum, maka pada bab IV ini penulis akan menjelaskan bagaimanakah kesesuaian penerapan Akutansi Berterima Umum.

4.3.1. Dasar Pencatatan, Pengakuan Pendapatan dan Beban

Desa Sialang Panjang dalam proses pencatatan menggunakan sistem pencatatan buku tunggal (*Single Entry*). Sistem pencatatan buku tunggal merupakan sistem pencatatan transaksi hanya dilakukan sekali. Semua transaksi yang menambah kas Desa akan dimasukkan ke kolom penerimaan sedangkan transaksi yang mengurangi Kas Desa akan dimasukkan ke kolom pengeluaran.

Adapun dasar pengakuan yang diterapkan Desa Sialang Panjang adalah Basis Kas (*Cash Basis*). Basis Kas merupakan semua transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran dicatat atau diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

4.3.2. Siklus Akuntansi Pada Desa Sialang Panjang

Dalam proses pengelolaan keuangan yang terjadi pada Desa Sialang Panjang dimulai dari Bendahara Desa pertama kali melakukan pencatatan bukti transaksi APBDesa yang ada kedalam Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Panjak. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai. Buku Bank digunakan untuk mencatat transaksi terkait dengan penerima maupun pengeluaran melalui Bank. Buku Pembantu Pajak digunakan

untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh Bendahara Desa.

Kemudian diakhir tahun Bendahara Desa membuat laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Bentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri atas jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun anggaran tertentu. Laporan Kekayaan Milik Desa terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki Desa Sialang Panjang.

1. Buku Kas Umum

Transaksi yang terjadi diDesa Sialang Panjang baik itu dari Penerimaan maupun peneluaran di catat kedalam Buku Kas Umum. Berikut ini adalah beberapa contoh terkait penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di Desa Sialang Panjang.

10 Desember 2018	Bendahara Desa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 289.000.000
28 Desember 2018	Pembayaran operasional RT/RW Rp. 47.025.000
28 Desember 2018	Pembayaran atas penghasilan tetap dan tunjangan kades dan prangkat Rp. 170. 450.000

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh Desa Sialang Panjang yaitu:

Tabel IV.2

**Buku Kas Umum-Tunai
Pemerintah Desa Sialang Panjang
Tahun Anggaran 2018**

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	10/12/2018		Kas di bendahara	289.000.000	
2	28/12/2018		Pembayaran Operasional RT/RW		47.025.000
3	28/12/2018		Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan		170.450.000

Sumber: *Buku Kas Umum Tunai Desa Sialang Panjang*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Buku Kas Umum-Tunai Desa Sialang Panjang telah sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP 2015. Tetapi Desa tidak membuat jurnal atas transaksi yang terjadi. Seharusnya Desa Sialang Panjang membuat jurnal atas setiap transaksi yang terjadi dan kemudian memposting ke buku besar.

Berikut ini contoh jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran yang seharusnya dibuat oleh Desa Sialng Panjang adalah:

Tabel IV.3

Jurnal Umum Penerimaan Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10/12/2018	Kas di bendahara pengeluaran desa		289.000.000	
	Kas desa		-	289.000.000

Sumber: *Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020*

Tabel IV.4**Jurnal Pengeluaran Kas**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
28/12/2018	Belanja operasional RT/RW Kas dibendahara pengeluaran desa		47.025.000	47.025.000
28/12/2018	Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kas dibendahara pengeluaran desa		170.450.000	170.450.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Setelah desa sialang panjang membuat jurnal umum atas semua transaksi yang terjadi, maka desa kemudian memposting jurnal umum tersebut ke dalam buku besar. berikut ini adalah contoh buku besar yang seharusnya dibuat oleh desa sialang panjang, yaitu:

Tabel IV.5**Buku Besar**

Nama Akun: Kas dibendahara pengeluaran

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
10/12/2018	Tunai		289.000.000		289.000.000	
28/12/2018	Pembayaran biaya operasional RT/RW			47.025.000	241.975.000	
28/12/2018	Pembyaran penghasilan tetap dan tunjangan			170.450.000	71.525.000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Tabel IV.6**Buku Besar**

Nama Akun: Belanja Operasional RT/RW

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
28/12/2018	Pembayaran operasional RT/RW		47.025.000		47.025.000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020**Tabel IV. 7****Buku Besar**

Nama Akun: Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
28/12/2018	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan		170.450.000		170.450.000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020**2. Neraca saldo**

Setelah semua transaksi sudah di posting ke dalam buku besar, seharusnya sialang panjang menyusun neraca saldo terlebih dahulu sebelum menyusun laporan keuangan desa. Berikut ini adalah contoh neraca saldo yang seharusnya dibuat ole desa, yaitu:

Tabel IV. 8**Neraca Saldo**

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas Desa		289.000.000
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. operasional RT/RW	47.025.000	
b. penghasilan tetap dan tunjangan	170.450.000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

3. Buku Bank

Buku bank desa digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaandan pengeluaran yang berhubunga dengan uang bank. Bendahra desa menggunakan buku bank desa dalam mencatat transaksi-transaksi pendapatan dan belanja pada desa sialang panjang baik untuk trasfer maupun bersifat tunai. Berikut adalah transaksi yang dicatat pada buku bank desa:

- 24 Mei 2018 Desa sialang panjang menerima Alokasi Dana Desa tahap 1 sebesar Rp. 367.897.800
- 24 Mei 2018 Desa sialang panjang menerima Dana Desa tahap 1 sebesar Rp. 153.969.400
- 7 Juni 2018 Desa sialang panjang melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 34.750.000
- 26 Juni 2018 Desa sialang panjang melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 38.590.000

Berikut ini adalah tabel penyajian transaksi pada buku bank desa sialang panjang:

Tabel IV.9

**Buku Bank
Pemerintah Desa Sialang Panjang
Tahun Anggaran 2018**

No	Tanggal	Uraian	Nomor bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.A dmi n (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/05/2018	Alokasi Dana Desa Tahap 1 2018	003/TB P/12.02/2018	367.897.800	-	-	-	-	367.897.800
2	24/05/2018	Dana Desa Tahap 1 2018	004/TB P/12.02/2018	153.969.400	-	-	-	-	153.969.400
3	07/06/2018	Ditarik Tunai	0038/B ANK/1 2.02/2018	-	-	34.750.000	-	-	34.750.000
4	26/06/2018	Ditarik Tunai	0039/B ANK/1 2.02/2018	-	-	38.590.000	-	-	38.590.000

Sumber: Buku Bank Desa Sialang Panjang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa buku Desa sialang panjang sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP 2015.

4. Buku Kas pembantu Pajak

Buku pembantu pajak digunakan Desa Sialang Panjang untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara Desa. Transaksi belanja pemerintah Desa akan dikenakan pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Apabila total belanja yang dilakukan kurang dari Rp 2.000.000, maka pemerintah Desa hanya dikenakan Pajak pertambahan Nilai (PPN). Jika total belanja melebihi Rp. 2.000.000 maka pemerintah Desa akan dikenakan PPh pasal 22 dan PPN. Berikut ini contoh transaksi belanja yang terjadi pada Desa Sialang Panjang :

- 05 juli 2018 Desa sialang panjang membeli 1 unit speaker sebesar Rp. 1.363.640 Transaksi ini dikenakan PPN sebesar Rp.136.364.
- 05 juli 2018 Desa sialang panjang membeli APE sebesar Rp. 1. 818.180. Transaksi ini dikenakan PPN sebesar Rp. 181.818 dan PPh pasal 22 sebesar Rp. 27.273.
- 05 juli 2018 Desa sialang panjang membeli 1 unit kipas angin sebesar Rp. 909.090 transaksi ini dikenakan PPN sebesar Rp. 90.909.
- 05 juli 2018 Desa sialang panjang membeli 1 unit mesin TIK Rp. 3.636.360. Transaksi ini dikenakan PPN sebesar RP. 363.636 dan PPh pasal 22 sebesar Rp. 54.545.

Tabel IV.10

**Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintah Desa Sialang Panjang
Tahun Anggaran 2018**

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	05/07/2018	00065/KWT/13.04/2018 Belanja speaker			
		Potongan Pajak PPN pusat	136.364	0	7.431.234
2	05/07/2018	00066/KWT/13.04/2018 Belanja APE			
		Potongan pajak PPN pusat	181.818	0	7.640.325
		Potongan pajak pph pasal 22	27.273	0	7.458.507
3	05/07/2018	00069/KWT/13.04/2018 Belanja Kipas Angin			
		Potongan Pajak PPN Pusat	90.909	0	7.731.234
4	05/07/2018	00070/KWT/13.04/2018 Belanja Mesin Tik			
		Potongan Pajak PPN pusat	363.636	0	8.094.870
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.545	0	8.149.415

Sumber: *Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sialang Panjang*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sialang Panjang telah sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP 2015.

5. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Desa Sialang Panjang Menggunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Berikut salah satu Buku Kas Pembantu Kegiatan yang dibuat oleh Desa Sialang Panjang.

Tabel IV.11

**Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Sialang Panjang
Tahun Anggaran 2018**

1. Bidang : 01. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan

No	Tanggal	uraian	Penerimaan		No bukti	pengeluaran		Jumlah pengembalian ke bendahara	Saldo kas (Rupiah)
			Dari bendahara	Swadaya masyarakat		Belanja barang dan jasa	Belanja modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26/05/2018	Pembayaran penghasilan tetap kades dan perangkat	121.750.000	-	0001/SPP/13.04/2018	-	-	-	121.750.000
2	28/12/2018	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat	170.450.000	-	0052/SPP/13.04/2018	-	-	-	292.200.000

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Sialang Panjang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Sialang Panjang telah sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP 2015.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang telah dimiliki organisasi karena disebabkan dimasa lalu, yang nantinya dimasa yang akan datang baik itu manfaat ekonomi atau manfaat sosial akan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terdapat dalam organisasi, serta sumber daya ekonomi tersebut juga bisa dinilai dengan satuan mata uang. Aset terbagi menjadi dua yaitu aset yang bisa dicairkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk aset yang lain dalam jangka waktu satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas dan bank, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya. Sedangkan aset tidak lancar yaitu aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tidak lancar terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangun, jalan, jaringan dan instalasi dan aset tidak lancar lainnya. Aset akan diakui ketika aset tersebut diterima atau ketika hak kepemilikan atas aset tersebut telah berpindah.

Aset tetap yang terdapat didalam Laporan Kekayaan Milik Desa Sialang Panjang telah disajikan sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 dan IAI-KASP 2015. Tetapi desa tidak melakukan perhitungan beban perhitungan terhadap aset yang dimiliki oleh Desa Sialang Panjang. Oleh karna itu, nilai Akumulasi Penyusutan yang disajikan di Laporan Kekayaan Milik Desa Sialang Panjang bernilai Rp.0. dengan ini berarti harga perolehan Aset Tetap tidak dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Sehingga tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya pada Aset Tetap tersebut. Desa sialang panjang seharusnya menghitung Beban Penyusutan terhadap aset tetap pada tahun 2018, dimana terdapat akun tanah, Peralatan Dan Mesin, Jalan, Jaringan Dan Instalasi.

Perhitungan beban penyusutan ini perlu dilakukan agar nilai aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya. Berikut contoh perhitungan beban penyusutan pada aset tetap.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa, nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan di tahun 2018 sebesar Rp. 100.670.000 dengan estimasi umur ekonomis ditaksir 5 tahun. Jalan, jaringan dan instalasi Rp. 802.667.500 dengan estimasi umur ekonomis ditaksir 20 tahun. Dengan menggunakan metode Garis Lurus, maka dapat dihitung beban penyusutan pertahunnya yaitu sebagai berikut:

1. Penyusutan pada Peralatan dan Mesin

$$\text{Pertahun: } 100.670.000 : 5 \text{ tahun} = \text{Rp. } 20.134.000$$

2. Penyusutan pada Jalan, Jaringan dan Instalasi

$$\text{Pertahun: Rp. } 802.667.500 : 20 \text{ tahun} = \text{Rp. } 40.133.375$$

Berdasarkan perhitungan diatas, seharusnya pencatatan yang dilakukan Desa Sialang Panjang sebelum tutup buku yaitu sebagai berikut:

a. Pencatatan untuk penyusutan Peralatan dan Mesin

$$\text{Beban Penyusutan peralatan dan mesin} \quad \text{Rp. } 20.134.000$$

$$\text{Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin} \quad \text{Rp. } 20.134.000$$

b. Pencatatan untuk Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Instalasi

$$\text{Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi} \quad \text{Rp. } 40.133.375$$

$$\text{Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi} \quad \text{Rp. } 40.133.375$$

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 terdapat Aset Tetap senilai Rp. 965.578.100. Yaitu berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 86.952.000, gedung dan bangunan sebesar Rp. 28. 687.000, jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp. 849.339.100, aset tetap lainnya sebesar Rp. 600.000. ditahun 2018 belanja modal dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDesa senilai Rp. 839. 327.500 yaitu berupa belanja modal pengadaan alat-alat angkutan sebesar Rp. 1.500.000 berupa belanja modal pengadaan mesin pertanian sebesar Rp. 1.945.000, belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya sebesar Rp. 35.615.000, belanja modal pengadaan kipas angin sebesar Rp. 1.000.000, belanja modal pengadaan mesin tik sebesar Rp. 4.000.000, belanja modal pengadaan komputer / PC, note book sebesar Rp. 20.000.000, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan sebesar Rp. 31.600.000, belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp. 575.065.000, belanja modal pengadaan konstruksi jembatan sebesar Rp. 70.157.500, belanja modal pengadaan konstruksi jerambah sebesar Rp. 157.445.000, belanja modal pengadaan sarana dan prasarana PAUI sebesar Rp. 4. 215.000, belanja modal pengadaan dandang/wajan/kuali dan S sebesar Rp. 795.000, belanja modal pengadaan buku dan kepustakaan sebesar Rp. 50.000. disaldo Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 saldo aset tetap adalah senilai Rp. 903.387.500 yang terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp. 100.670.000, jalan jaringan dan instalasi sebesar Rp. 802.667.500 dan aset lainnya sebesar Rp. 50.000, pemerintahan desa sialang panjang tidak melakukan penambahan aset pada laporan kekayaan milik desa untuk tahun 2018.

Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan bagian dari aset lancar dan salah satu yang disimpan yang akan digunakan dengan tujuan tertentu. Adapun iaan ATK (Alat Tulis Kantor) yang terdapat didalam Laporan Kekayaan Desa Sialang Panjang telah disajikan sesuai dengan permendagri No 113 2014 dan IAI-KASP 2015. Namun, Desa Sialang Panjang tidak membuat penyesuaian terhadap persediaan ATK (Alat Tulis Kantor), oleh karna itu ersediaan ATK yang disajikan di Laporan Kekayaan Milik Desa Bersaldo Sehingga tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Desa Sialang Panjang snya membuat jurnal penyesuaian terhadap Persediaan Alat Tulis Kantor, atan jurnal penyesuaian ini perlu dilakukan agar nantinya nilai persediaan disajikan didalam Laporan Kekayaan Milik Desa menunjukkan nilai yang rnya. Perkiraan nilai pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp. 800. Jika ditaksir pada akhir periode persediaan ATK habis terpakai semua. jurnal penyesuaian dari persediaan ATK yang seharusnya adalah sebagai

Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 4.314.800
------------------------------	---------------

4.3.3. Penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari kolom Anggaran, Realisasi dan kolom Lebih/Kurang. Dimana laporan ini menggambarkan apakah pembiayaan, belanja dan pendapatan didesa telah disajikan sesuai dengan anggaran atau tidak. Desa Sialang Panjang telah menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sekali dalam setahun. Berikut ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa pada Desa Sialang Panjang:

Tabel IV.12

**Laporan realisasi pelaksanaan
Anggaran pendapatan dan belanja desa
Pemerintah desa sialang panjang
Tahun anggaran 2018**

Koderek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	3.4405.000	3.4405.000	0
1.1.4	Hasil Usaha Desa	3.4405.000	3.4405.000	0
1.2.	Pendapatan Transfer	1.501.428.800	1.501.428.800	0
1.2.1	Dana Desa	769.847.000	769.847.000	0
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.418.800	18.418.800	0
1.2.3	Alokasi Dana Desa	613.163.000	613.163.000	0
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.508.873.800	1.504.873.800	0
2.	BELANJA			
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	618.848.007	586.957.800	31.890.207
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	808.777.000	802.667.500	6.109.500
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	130.260.000	130.155.000	105.000
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.557.000	14.873.000	648.000
	JUMLAH BELANJA	1.573.442.007	1.534.653.300	38.788.707
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(68.568.207)	(29.779.500)	(38.788.707)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	68.568.207	68.568.207	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.568.207	68.568.207	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	68.568.207	68.568.207	0
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	38.788.707	(38.788.707)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sialang Panjang

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Sialang Panjang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP 2015.

4.3.4. Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang pada dasarnya disusun untuk mengetahui selisih dari aset yang telah desa miliki dengan total kewajiban desa dalam satu periode. Sehingga dengan begitu Laporan Kekayaan Milik Desa akan menyajikan informasi dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh desa yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.

Laporan Kekayaan Milik Desa Sialang Panjang sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tetapi Desa Sialang Panjang tidak menghitung beban penyusutan terhadap aset tetap seperti peralatan dan mesin, jalan jaringan dan instalasi. Seharusnya Desa Sialang Panjang melakukan perhitungan beban penyusutan terhadap Aset tetap yang dimiliki oleh desa sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut ini adalah format keuangan milik desa yang seharusnya dibuat oleh Desa Sialang Panjang:

Tabel IV.13

**Pemerintah Desa Sialang Panjang
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai dengan 31 Desember 2018**

Kode	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Tahun 2017 (Rp)
1	2	3		
1.	ASET			
1.1.	Aset Lancar			
1.1.1.	Kas di BANK	38.788.707		75.360.769
1.1.1.01.	Kas Di Bendahara Desa			
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	38.788.707		75.360.769
1.1.2.	Piutang			
1.1.3.	Persediaan			
	Jumlah Aset Lancar	38.788.707		75.360.769
1.2.	Investasi			
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa			
	Jumlah investasi			
1.3.	Aset Tetap			
1.3.1.	Tanah			
1.3.2	Peralatan dan mesin	100.670.000		86.952.000
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(20.134.000)	80.536.000	
1.3.4.	Jalan, jaringan dan instalasi	802.667.500		849.339.100
	Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi	(40.133.375)	762.534.125	
	Jumlah Aset Tetap	843.070.125		936.291.100
1.4.	Dana Cadangan			
	Jumlah Dana Cadangan			
	JUMLAH ASET	881.858.832		1.011.651.869
	KEWAJIBAN			
	JUMLAH KEWAJIBAN			
3.	EKUITAS			
3.1.	Ekuitas			
3.1.1.	Ekuitas	843.070.125		936.291.100
3.1.2.	Ekuitas SAL	38.788.707		75.360.769
	Jumlah Ekuitas	881.858.832		1.011.651.869
	JUMLAH EKUITAS	881.858.832		1.011.651.869
	JUMLAHKEWAJIBAN DAN EKUITAS	881.858.832		1.011.651.869

Sumber: Hasil pengolahan Data Penulis tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Kekayaan Milik Desa Sialang Panjang telah Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan IAI-KASP 2015.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran diantaranya :

5.1. Kesimpulan

1. Desa Sialang Panjang menggunakan dasar pencatatan *single entry*, yang artinya ada penambahan maka dicatat di penerimaan dan jika terjadi pengurangan akan dicatat di pengeluaran.
2. Desa Sialang Panjang menggunakan *cash basis*, yang berarti bahwa pencatatan akan dilakukan jika uang benar-benar telah diterima atau telah dikeluarkan.
3. Desa Sialang Panjang dalam penerapan akuntansinya belum sepenuhnya mengikuti PABU.
4. Desa Sialang Panjang pada akhir tahun tidak membuat jurnal penyesuaian pada persediaan ATK. SSSS
5. Desa Sialang Panjang tidak menghitung penyusutan pada Aset Tetap

5.2. Saran

1. Desa Sialang Panjang sebaiknya memakai system pencatatan *Double Entry*, yaitu apabila terjadi transaksi dicatat pada debit dan kredit, agar semua transaksi dicatat lebih rinci.
2. Desa Sialang Panjang sebaiknya menggunakan *Accrual basis*, karena transaksi akan diakui dan ditulis pada saat terjadinya transaksi.

3. Desa sialang panjang sebaiknya membuat Siklus akuntansi dimulai dari tahap pencatatan, tahap penggolongan dan tahap pengikhtisaran.
4. Desa sialang panjang sebaiknya dalam pembuatan laporan keuangannya harus berpedoman pada PABU.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indri. 2015. Akuntansi Kecamatan Dan Desa. Jakarta: Erlangga.
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Catur, Sasongko. 2016. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
- Desa. Jakarta: BPKP.
- Dianto, Iyoyo. 2014. Pengantar Akuntansi 1. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Halim, Abdul Dan Muhammad Syam kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta: Kompartemen Asp.
- Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- S.R, Soemarso. 2010. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadeli, Lili. 2015. Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Dana Desa. Yogyakarta: Pusaka Baru Pres.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ulina, Martha. 2018. Analisi Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Warren, Crl. Dkk. 2014. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gava Media.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.